

OMBUDSMAN KALSEL TERAPKAN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI

Jum'at, 26 Juni 2020 - Zayanti Mandasari

BANJARMASIN - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan terapkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dilingkungan kerjanya sebagai bentuk keterbukaan terhadap publik.

Penandatanganan gerakan agen perubahan Ombudsman dilakukan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid disaksikan Wakil Ketua MUI Kalsel Prof Dr H Hafiz Anshari danlainnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, mengatakan, kalau dari sisi zona integritas Ombudsman sejak tahun 2015 ketika awal penancangan zona integritas.

Tapi lalu di kantor perwakilan di seluruh Indonesia, sebelumnya Ombudsman selalu jadi saksi tapi lalu harus dibuat juga di kantor perwakilan karena Ini penting sekali.Walaupun soal gratifikasi, korupsi segala macam itu merupakan wilayah pengawasan Ombudsman itu sendiri tidak mungkin sapunya kotor melakukan bersih-bersih.

"Ada komitmen yang tinggi dari kawan-kawan di kantor, bahkan seluruh Indonesia pertama kali kantor perwakilan Ombudsman Kalsel yang melakukan penancangan itu, staf Ombudsman Kalsel terpilih sebagai agen perubahan secara nasional," ujar Noorhalis Majid di Banjarmasin, Kamis (25/6).

Jadi dicari agen-agen perubahan Ombudsman RI, dialah yang menjadi duta untuk memberikan contoh. "Kalau kasus yang akses Ombudsman Kalsel sudah lebih 300 sampai bulan Juni ini, kalau bantuan sosial sudah 90 lebih dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial di 4 kabupaten mereka menyatakan tidak ada dana untuk mengakomodir itu," jelasnya.

Dinas Sosial mengatakan mereka tidak bisa transparan dalam soal siapa penerima, karena ada permintaan dari DPR kalau ditransparankan siapa penerima akan membuat malu penerimanya.Kalau ketika itu tidak ditransparankan akan banyak orang menerima Banyak saluran.

Wakil Ketua MUI Kalsel Prof Dr H Hafiz Anshari, mengatakan, ini merupakan suatu kegiatan yang bagus ada penancangan zona integritas oleh Ombudsman Kalsel. "Kita sangat berharap korupsi sampai hari ini masih merajalela di Indonesia secara perlahan bisa kita basmi," ujarnya.

Kenapa karena ini sudah membudaya dengan cara penyelesaian budaya juga, sekeras apapun hukuman yang diberikan tidak akan memberikan efek jera, tapi yang lain tetap karena merasa aman.

"Penegakan hukum ya wajib hukumnya, tapi yang saya rasa penting pembudayaan kalau tidak kita hanya bisa menyelesaikan sebagian bahkan ada kesan paling yang kecil-kecil diproses sedangkan besar tidak bisa.Insa Allah kegiatan semacam ini lembaga-lembaga lain bisa melakukan sehingga Indonesia dan khususnya Kalsel bisa terbebas korupsi dan nepotisme.rds